

Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri Turki Terhadap Tiongkok pada Masa Pemerintahan *Adalet Ve Kalkinma Partisi* (AKP) Tahun 2002-2013

Dewa Ayu Tania Taradewi, I Made Anom Wiranata, A.A. Ayu Intan Parameswari

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email : tanntaradewi75@gmail.com, anomwiranata@unud.ac.id,
intan.parameswari@unud.ac.id

ABSTRAK

Tulisan ini membahas mengenai politik luar negeri Turki terhadap Tiongkok dimasa pemerintahan Justice and Development Party atau Adalet Ve Kalkinma Partisi (AKP). Hal ini sangat menarik mengingat Turki merupakan negara yang memiliki ideologi yang membuatnya memiliki orientasi politik luar negeri yang memiliki kecondongan untuk menjalin hubungan yang lebih dengan negara di Dunia Barat, namun pasca kemenangan AKP Turki menjalani politik luar negeri yang mempererat hubungannya dengan negara-negara di Dunia Timur yang salah satunya adalah Tiongkok. Dalam skripsi ini penulis meneliti faktor-faktor yang membuat Turki menjalankan politik luar negeri yang mempererat hubungan dengan Tiongkok pada masa pemerintahan AKP. Lokus waktu yang digunakan adalah tahun 2002-2013. Tahun 2002 merupakan tahun kemenangan AKP pada pemilu Turki. Dengan metodologi kualitatif peneliti menemukan bahwa politik luar negeri Turki terhadap Tiongkok dipengaruhi oleh pergeseran identitas dari Kemalis menuju Neo-ottoman era AKP serta faktor yang muncul akibat adanya redefinisi identitas dan kepentingan nasional Turki pada masa pemerintahan AKP. Keadaan demikian membuat adanya pergeseran orientasi politik luar negeri Turki ke Tiongkok pada masa AKP.

Kata Kunci : Politik luar negeri Turki, Identitas, Adalet Ve Kalkinma Partisi (AKP)

1.PENDAHULUAN

Turki merupakan negara yang berada diantara dua benua yaitu Eropa dan Asia. Namun letak geografis tersebut tidak langsung membuat Turki memiliki hubungan luar negeri yang erat dengan negara-negara di Asia seperti hubungannya dengan Eropa. Kedekatan Turki yang lebih condong dengan Eropa dapat terlihat dari usaha Turki untuk menjadi anggota tetap dari Uni Eropa. Selain itu, Turki juga membangun kedekatan dengan negara Barat lainnya dengan bergabung dalam NATO (North Atlantic Treaty Organization) dan menjadi aliansinya (Ministry of Foreign Affairs, n.d).

Kedekatan Turki dengan Dunia Barat sudah terlihat dari diadopsinya model *laicite Prancis* dalam ideologi Turki (hashem, 2010). Model tersebut mengedepankan prinsip sekularisme. Prinsip sekularisme memisahkan antara pemerintahan dengan agama, keadaan tersebut sangat ditekankan di Turki. Sehingga berdasarkan keadaan tersebut, Turki selama beberapa dekade dikuasai oleh partai sekuler. Keadaan yang demikian membuat Turki semakin memiliki kecondongan dengan Dunia Barat.

Tahun 2002 muncul pemenang baru dalam pemilu Turki. *Adalet Ve Kalkinma Partisi* (AKP) muncul sebagai partai

pemenang. Kemenangan *Justice and Development Party* (AKP) membawa perubahan politik luar negeri Turki terhadap negara-negara di dunia (Edelman, Cornell, Lobel, & Makovsky, 2013). Pergeseran arah orientasi politik luar negeri Turki yang pada awalnya memiliki kecondongan ke Barat kemudian mulai bergeser ke negara Dunia Timur. Turki tertarik meningkatkan hubungan luar negeri dengan negara di Timur Tengah dan Asia. Khusus untuk Asia, ada beberapa negara yang menarik perhatian Turki diantaranya adalah Tiongkok. Peningkatan hubungan Turki kepada Tiongkok menarik untuk diteliti mengingat Tiongkok berkembang sebagai salah satu kekuatan dunia serta dalam sejarah Tiongkok tercatat sebagai negara yang menjadi "musuh" dari sekutu Turki.

Hubungan yang dijalin Turki dengan Tiongkok pada masa pemerintahan AKP menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Perdagangan Turki dan Tiongkok pada tahun 2000 hanya mencapai angka \$ 1 miliar dolar lalu meningkat menjadi \$24 miliar dolar saat ini (Ministry of Foreign Affairs, n.d). Peningkatan juga terjadi pada hubungan militer. Sorotan dunia mengarah kepada Turki pada tahun 2010 pada saat Turki mengundang Tiongkok untuk bergabung dalam latihan militer Anatolian Eagle. Diundangnya Tiongkok menjadi isu yang sangat sensitif antara Turki dan Amerika Serikat serta anggota NATO lainnya. Sensitifnya isu tersebut dikarenakan munculnya kecemasan dari Amerika Serikat dan NATO akan adanya kebocoran informasi teknologi persenjataan militernya ke tangan Tiongkok (Zambelis, 2011). Kecemasan tersebut tidak membuat Turki membatalkan undangannya kepada Tiongkok dan tetap melanjutkan meskipun ada pro-kontra. Kecemasan yang terjadi pada aliansi Turki tidak membuat Turki menghentikan kerjasama hanya sampai pada latihan militer Anatolian Eagle saja dengan Tiongkok.

Kerjasama berlanjut dalam kerjasama pengadaan persenjataan untuk militer Turki. Pada 2013 Turki menggunakan jasa perusahaan militer Tiongkok yaitu China Precision Machinery Import and Export Corp (CPMIEC) untuk pengembangan sistem rudalnya. Terpilihnya China Precision Machinery Import and Export Corp (CPMIEC) mengalahkan penawaran sistem

Rudal dari perusahaan militer Amerika Serikat, Raytheon dan Lockheed Martin dan membuat dunia terkejut. Hal tersebut dikarenakan perusahaan Tiongkok ini masuk dalam daftar hitam Amerika Serikat dikarenakan perusahaan ini pernah dilaporkan memiliki hubungan dengan Iran dan Korea Utara (Anggoro, 2014).

Berdasarkan latar belakang tersebut ditarik rumusan masalah sebagai berikut : "Mengapa Turki menjalankan politik luar negeri yang mempererat hubungan luar negeri dengan Tiongkok pada masa pemerintahan AKP?"

Untuk menganalisis permasalahan diatas menggunakan perspektif Konstruktivisme. Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis kualitatif eksplanatif. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan menjelaskan (to explain) faktor-faktor yang menyebabkan Turki untuk mempererat hubungan dengan Tiongkok pada masa pemerintahan AKP.

2. PEMBAHASAN

Turki merupakan negara yang terbentuk setelah keruntuhan Kekaisaran Ottoman. Turki terbentuk sebagai negara Republik Konstitusional dibawa Mustafa Kemal Atatürk. Turki menganut ideologi yang disebut dengan Kemalis. Terdapat enam bagian dalam ideologi ini yaitu *Republicanism, Nationalism, Populism, Revolutionism, Secularism, dan Statism*. (Shaw & Shaw, 1977).

Ideologi-ideologi tersebut menjadi prinsip dasar atas Republik Turki yang baru. Dari keenam ideologi tersebut Sekularisme melandasi sebagian besar karakteristik pemerintahan Turki. Sekularisme dikenal dengan adanya pemisahan antara negara dengan agama (Hashem, 2010). Berkembangnya Turki modern dengan paham Kemalis turut diikuti dengan berkembangnya dunia politik dalam negeri dan luar negeri Turki.

Politik luar negeri Turki sebelum kemenangan AKP sangat dipengaruhi oleh ideologi Kemalis. Politik luar negeri Turki memiliki prinsip "*Peace in the home, peace*

in the world" (Ministry of Foreign Affairs, n.d). Prinsip ini mengedepankan perdamaian di dalam negaranya maupun di dunia.

Mustafa Kemal Ataturk juga memiliki prinsip *Westward* atau kecondongan teradap Dunia Barat. Dunia Barat tidak hanya penting dalam urusan politik tetapi juga ekonomi. Pada tujuan yang terakhir Mustafa Kemal Ataturk juga memiliki tujuan untuk melakukan westernisasi. Westernisasi diidentifikasi oleh Mustafa Kemal Ataturk sebagai Modernisasi. Modernisasi atau Westernisasi ini tercantum sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh Turki serta tercantum dalam National Pact 1920 (Gol, 1992).

Pentingnya Dunia Barat di mata Mustafa Kemal Ataturk dapat dilihat dari prinsip dan tujuan yang dikembangkan olehnya. Prinsip dan tujuan yang dibangun oleh Mustafa Kemal Ataturk membuat Turki lebih fokus dalam menjalin kerjasama politik, ekonomi dan militer dengan negara-negara Barat. Pada masa Mustafa Kemal Ataturk perhatian Turki lebih banyak untuk menjalin hubungan dengan Dunia Barat. Keadaan yang demikian membuat negara-negara di belahan dunia lainnya seperti di Asia dan Timur-Tengah kurang mendapatkan perhatian dari Turki. Kurangnya perhatian Turki terhadap negara-negara di Asia dan Timur Tengah ini membuat minimnya kerjasama antara Turki dengan negara-negara di Asia maupun Timur Tengah baik kerjasama bilateral maupun multilateral. Bahkan pada masa Mustafa Ataturk belum ada kerjasama antara Turki dan Tiongkok.

Turki belum membuka dan mengadakan hubungan bilateral dengan Tiongkok secara resmi. Turki pada saat Perang Dunia II mengambil posisi netral di dalam politik internasional namun pada akhir perang Turki memutuskan untuk bergabung bersama dengan Sekutu pada 23 Februari 1945. Kedekatan Turki semakin erat dengan sekutu khususnya dengan Amerika Serikat (United Nations, 2006).

Bergabung dengan pasukan PBB dalam Perang Korea pada tahun 1950an. Perang Korea membuat Turki berhadapan langsung dalam medan perang dengan Tiongkok. Tiongkok merupakan bagian dari Blok Timur bersama dengan Uni Soviet dan Korea Utara (Shichor, 2009). Konfrontasi langsung antara Turki dengan Tiongkok pada saat Perang Korea menyisakan hubungan yang negatif diantara kedua negara. Hubungan negatif yang terjalin antara Turki dengan Tiongkok berdampak kepada persepsi negatif diantara kedua negara (Colakoglu, 2013).

Hubungan antara Turki dengan Tiongkok dibuka pada tahun 1971, namun hubungan antara kedua negara ini tidak mengalami peningkatan yang signifikan hingga tahun 1980-an. Tahun 1981 terjadi peningkatan hubungan antara Turki dengan Tiongkok. Namun penurunan hubungan kedua negara terjadi pada periode tahun 1990 hingga 2002. Penurunan yang terjadi disebabkan oleh berbagai isu baik dalam negeri Turki maupun Tiongkok.

Di tahun 2002, AKP memenangkan pemilu dengan perolehan suara 34,28 %. Suara yang diperoleh menempatkan *Justice and Development Party* (AKP) sebagai partai mayoritas dengan memenangkan sebanyak 363 kursi di parlemen (AKParti.org,n.d). Pada pemilu di tahun 2002 *Justice and Development Party* (AKP) yang berada pada posisi kedua ditempati oleh *Cumhuriyet halk Partisi* (CHP) atau Partai Republik dengan perolehan suara sebesar 19,39 % suara dengan mendapatkan kekuasaan atas 178 kursi di Parlemen Turki (AKParti.org, n.d). Dengan keadaan yang demikian, AKP dengan mudah membentuk pemerintahan dengan partai tunggal (Edelman, Cornell, Lobel, & Makovsky, 2013).

Kemenangan AKP dalam pemilu memosisikannya sebagai penguasa baru di Turki. Sebagai penguasa baru, terdapat beberapa perubahan dalam kebijakan luar negerinya dengan Tiongkok. Turki yang sebelumnya memiliki kecondongan dengan

Dunia Barat mulai menagalami perubahan dalam kebijakan luar negerinya dengan Tiongkok.

Turki melakukan beberapa kerjasama dengan Tiongkok. Beberapa kerjasama antara Turki dan Tiongkok mendapatkan sorotan dari dunia. Peningkatan kunjungan kenegaraan mengawali dipereratnya hubungan antara Turki dengan Tiongkok. Kunjungan Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan pada taun 2003, sebagai awal peningkatan kerjasama antara Turki dan Tiongkok. Kunjungan Erdogan selanjutnya diikuti oleh kunjungan lain dari Presiden dan pejabat lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan kedua negara.

Kerjasama lain yang menjadi sorotan dunia adalah diundangnya Tiongkok dalam latihan militer bersama "*Anatolian Eagle*" yang mayoritas pesertanya merupakan anggota NATO. Tidak hanya sampai disitu Turki juga menjalin kerjasama militer dalam pengadaan senjata militer. Kerjasama tersebut terlaksana dengan dipilihnya perusahaan Tiongkok, *China Precision Machinery Import and Export Corp* (CPMIEC) dan menjadi *dialogue partner* dalam *Shanghai Cooperation Organization* (SCO) merupakan organisasi keamanan yang memiliki anggota sebagian besar negara yang berseberangan dengan aliansi Turki, NATO.

Kerjasama lain juga mulai ditingkatkan Turki terhadap Tiongkok dalam bidang ekonomi. Terjadi peningkatan dalam total volume perdagangan antara Turki dengan Tiongkok. Jika pada tahun 2000 mencapai angka \$ 1 miliar dolar lalu meningkat menjadi \$24 miliar dolar saat ini (Ministry of Foreign Affairs, n.d). Dalam bidang sosial dan budaya , kedua negara mempererat hubungan dengan mengadakan *Turkey years in China* dan *Chinese years in Turkey* (Ministry of Foreign Affairs, n.d).

Perubahan kebijakan luar negeri Turki teradap Tiongkok dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Pergeseran Identitas Nasional Turki

Pergeseran identitas yang telah berkembang semenjak zaman Turgut Ozal hingga masa pemerintahan AKP menyebabkan adanya perubahan orientasi politik luar negeri Turki terhadap Timur Tengah dan negara-negara di dunia. Perubahan orientasi yang terjadi terhadap politik luar negeri Turki lebih karena elit politik Turki mengartikan kembali "*who they are and what they want*" (Wendt, 1999). Mengartikan kembali "siapa dirinya dan apa yang mereka inginkan" (Wendt,1999) ini dilakukan oleh para elit politik di Turki dalam memasuki masa pemerintahan AKP. Elit yang dimaksud disini adalah para pemimpin Turki yang dikuasai oleh AKP baik Recep Tayyip Erdogan, Abdullah Gul dan kemudian muncul Ahmet Davotoglu.

Pemikiran Ahmet Davotoglu yang merupakan penasehat PM Erdogan dan juga menteri luar negeri, dituangkan dalam sebuah buku yang berjudul "*Strategic Depth*". Karya Ahmet Davotoglu sangat mempengaruhi adanya pergeseran identitas. Davotoglu berpandangan bahwa Turki dapat menjadi *center*, tidak hanya menjadi jembatan bagi Dunia Barat.

Ada empat hal yang menjadi pilar utama dalam *Strategic Depth* Ahmet Davotoglu yang sangat mempengaruhi politik luar negeri Turki terhadap hubungannya dengan negara-negara di dunia salah satunya adalah Tiongkok. Pertama "*Zero Problem Policy with Neighbors*", yang berarti ketiadaan masalah dengan tetangga" jelas menunjukkan keinginan Turki untuk tidak memiliki dan membuat masalah dengan negara tetangga. Turki semenjak di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Ataturk, berasumsi bahwa Turki dikelilingi oleh musuh. Namun sejak kemenangan AKP, asumsi ini mulai dicoba untuk ditinggalkan oleh Turki. Turki kini mulai

membangun hubungan baik dengan tetangganya.

Secara geografis Tiongkok bukan merupakan tetangga dari Turki tetapi kata "Zero Problem policy" juga diterapkan sebagai soft power oleh Turki kepada Tiongkok. Kemarahan Turki mengenai isu Xinjiang pada tahun 2009 tidak membuat Turki menjadikannya masalah berkepanjangan yang dapat memperburuk hubungan Turki dengan Tiongkok. Turki mencoba meredam kemarahannya dan kembali membangun hubungannya dengan Tiongkok. Perbaikan hubungan segera dilakukan oleh Turki dengan adanya undangan Turki kepada Tiongkok untuk bergabung dalam latihan militer Anatolian Eagle di tahun 2010. Kunjungan Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan ke Tiongkok pada tahun 2012 menjadi sejarah tersendiri bagi hubungan Turki dengan Tiongkok. Peristiwa ini menjadi kunjungan pertama Perdana Menteri Turki ke Tiongkok semenjak 27 tahun sebelumnya

Kedua, *Multidimensional Foreign Policy* Turki di bawah pemerintahan AKP, Turki tidak hanya menjalin hubungan dengan aliansi Dunia Baratnya saja tetapi mulai menjalin hubungan dengan negara lain yang salah satunya adalah Tiongkok. Pembicaraan Turki dengan Tiongkok di tahun 2012 mengenai keanggotaan Turki pada SCO (Shanghai Cooperation Organization) menjadi salah satu bentuk dari pelaksanaan *multidimensional foreign policy*.

Ketiga, A New Diplomatic Language, keunikan Turki yang menjadi jembatan antara Dunia Barat dengan Timur disadari oleh Ahmet Davotoglu sebagai sebuah keuntungan yang diterjemahkannya sebagai "strategic centrality". Turki menggunakan diplomasi yang fleksibel. Bahasa diplomasi yang baru ini digunakan oleh pemerintahan AKP sejak Davotoglu menjabat menjadi menteri luar negeri. Turki pada saat melakukan pembicaraan dengan negara di Dunia Timur maka Turki menggunakan identitas ketimurannya sementara ketika

berbicara dengan Eropa maka Turki menggunakan perspektif Eropa sebagai negara yang telah mengadopsi norma-norma dari Eropa.

Keempat dan yang terakhir Ahmet Davotoglu menambahkan bahwa pemerintah perlu melakukan penyesuaian terhadap efektivitas kebijakan luar negerinya. Penyelesaian yang dapat dilakukan seperti membangun hubungan bilateral dengan menambah frekuensi kunjungan tingkat tinggi para pejabat serta mengambil peranan menjadi tuan rumah dalam pertemuan-pertemuan tingkat tinggi. Kegiatan ini masuk ke dalam "*Transition to a Rhythmic policy*".

Konsep-konsep dan pandangan yang disampaikan oleh Ahmet Davotoglu di bawah payung besar *Strategic depth* menjadi konsep baru bagi identitas dan politik luar negeri Turki pada periode pemerintahan AKP. Pemikiran yang dikemukakan oleh Ahmet Davotoglu telah mampu membuat Turki mendefinisikan kembali jati diri dan keinginan yang mereka inginkan pada masa pemerintahan AKP. Diterimanya konsep dari Davotoglu ini sebagai prinsip politik luar negeri Turki di masa pemerintahan AKP disebabkan oleh faktor kedekatan Davotoglu dengan Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan. Kedekatan yang terjalin meningkatkan rasa kepercayaan Erdogan kepada Davotoglu. Rasa percaya itu kemudian membawa Davotoglu menjadi Ketua Dewan Penasehat Perdana Menteri Erdogan.

Melihat latar belakang Davotoglu sebagai seorang professor dalam ilmu hubungan internasional dan kinerjanya, maka pada tahun 2009 Erdogan mengangkat Davotoglu sebagai Menteri Luar Negeri Turki. Dengan posisi yang dimiliki oleh Davotoglu maka pemikirannya secara langsung mempengaruhi kebijakan luar negeri yang dibuat oleh pemerintahan AKP.

Keadaan seperti diatas di garis bawah oleh Roxanne Lynn Doty (1993) dalam tulisan Wicaksana, Roxanne Lynn

Doty memberikan perhatian yang lebih terhadap yaitu aspek kognitif dalam pembuatan kebijakan yang pada dasarnya aspek tersebut merupakan psikologi. Aspek ini menekankan kepada aspek kognitif dari individu yang terikat dalam pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara. Dengan demikian pembuatan kebijakan luar negeri Turki tidak dapat terlepas dari aspek kognitif dari individu yang memiliki peranan dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Individu-individu yang berperan seperti Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan, Presiden Abdullah Gul dan Menteri Luar negeri Ahmet Davotoglu.

2. Konstruksi Sosial Turki terhadap Perdagangan Internasional dengan Tiongkok

Pergeseran identitas yang terjadi mempengaruhi kepentingan nasional Turki. Identitas merupakan basis dari kepentingan, keadaan tersebut terkonstruksi secara sosial (Wendt, 1995). Sehingga adanya pergeseran identitas yang terjadi karena faktor ideasional turut mempengaruhi kepentingan nasional Turki. Ekonomi dalam konstruktivisme dipandang bukan sebagai sesuatu yang penting, namun ekonomi merupakan salah satu bagian dari kepentingan nasional suatu negara.

Dalam permasalahan ini, Konstruktivis dan Rationalisme memiliki pandangan yang berbeda terhadap rasionalitas. Rationalisme memandang rasionalitas sebagai “*given*” (Wendt, 1995) atau memang sudah adanya seperti itu sehingga keadaan yang demikian akan membuat setiap negara memiliki keputusan yang sama. Sedangkan konstruktivisme melihat munculnya rasionalitas dikarenakan adanya konstruksi sosial pada lingkungannya.

Definisi atas identitas sangat mempengaruhi sudut pandang untuk memilih cara mencapai kepentingan nasionalnya seperti yang Wendt (1999) sampaikan “*who they are and what they*

want”, siapa mereka dan apa yang diinginkan. Maka untuk mengambil keputusan menjalin hubungan ekonomi terutama dalam perdagangan dengan Tiongkok, keputusan Turki dipengaruhi oleh identitasnya yang merasa mulai memiliki kedekatan dengan Tiongkok. Keadaan yang demikian mendorong Turki untuk melakukan kerjasama ekonomi terutama perdagangan dengan Tiongkok. Dengan jumlah penduduk sebesar 1,3 milyar jiwa, Tiongkok menjadi pasar yang potensial bagi Turki.

3. Perasaan *Insecurity* Turki di dalam Keamanan dan Politik Internasional

Keamanan yang menjadi salah satu faktor Turki mempererat hubungan dengan Tiongkok pada masa pemerintahan AKP adalah keamanan fisik yang memiliki fokus kepada power dan politik. Konstruktivis memiliki pandangan yang berbeda dengan rationalisme. Konstruktivis memandang intisari dari keamanan adalah struktur sosial dibandingkan material dalam sistem internasional. Konstruktivis juga memandang power atau kekuatan dalam pandangan “*socially constructed*”, serta ilmu atau kekuatan ideasional dipandang sebagai kekuatan yang khususnya mampu memberikan dampak kepada kepentingan negara dan identitas (Karacasulu & Uzgoren, 2007).

Menghadapi gejolak politik yang tengah dialami oleh negara-negara di Timur Tengah merupakan isu yang penting bagi Turki. Pentingnya hal tersebut dikarenakan negara yang tengah bergejolak ini merupakan negara tetangga dari Turki. Permasalahan yang terjadi dapat berdampak ke Turki. Pergolakan yang terjadi terhadap negara tetangga Turki seperti Suriah, membuat Turki memperlakukan negara tetangganya dengan penuh kecurigaan yang muncul dari perasaan “*insecurity*” atas negaranya (Edelman, Cornell, Lobel, & Makovsky, 2013).

Munculnya perasaan *insecurity* dikarenakan Turki memandang konflik yang

terjadi pada negara tetangganya dapat menjadi ancaman bagi negaranya. Konstruktivis memandang keamanan dan ancaman tidak bersifat objektif dan tetap tetapi keduanya terkonstruksi secara sosial (Rieker, 2004). Dengan demikian dalam kaca mata konstruktivis Turki dapat merubah persepsinya atas perasaan *insecurity* dan ancaman dengan adanya evolusi dalam lingkungan dan kebiasaan (Karacasulu & Uzgoren, 2007).

Peristiwa diatas merupakan peristiwa yang memicu munculnya perasaan *insecurity* bagi Turki. Untuk mengurangi adanya perasaan *insecurity*, maka Turki berusaha untuk membuat dirinya merasa aman dengan menjalin hubungan dengan Tiongkok. Di bawah pemerintahan AKP, Turki memandang Tiongkok sebagai potensi sumber dukungan politik luar negeri yang sangat penting. Tiongkok tidak hanya penting secara ekonomi bagi Turki tetapi penting pula dalam politik dan keamanan internasional. Tiongkok di dalam politik dunia memiliki posisi yang kuat sebagai salah satu anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki hak veto (Colakoglu, 2013).

Penolakan yang terjadi pada proses penerimaan Turki menjadi anggota tetap EU juga turut memberikan dampak adanya perasaan tidak aman. Keadaan yang demikian membuat Turki memerlukan adanya dukungan dari negara yang memiliki *power*. Dukungan Tiongkok akan sangat berarti bagi Turki dalam perpolitikan dunia sekaligus dapat mengurangi ketergantungan dengan Amerika Serikat dan EU.

4. Konstruksi Sosial Turki dalam Memandang Ketidakamanan Lingkungan Eksternalnya

Munculnya perasaan "*insecurity*" atas keadaannya yang diapit oleh tetangga yang tengah mengalami pergolakan serta berbagai peristiwa lainnya, membuat Turki perlu meningkatkan sistem pertahanan dirinya. *Insecurity* muncul dikarenakan

adanya konstruksi sosial atas ancaman, musuh, dan konflik yang terjadi dalam lingkungan sosialnya. Perasaan *insecurity* merupakan bagian dari *security* yang merupakan sebuah *political construction* yang memprioritaskan interaksi sosial, identitas, peraturan dan norma. Perasaan *insecurity* yang dialami oleh Turki tidak hanya dapat diminimalkan dengan dukungan politik dari Tiongkok tetapi juga Turki perlu meningkatkan kemampuannya dalam kekuatan militer. Perlunya peningkatan kekuatan militer disebabkan karena perasaan *insecurity* ini muncul karena adanya potensi ancaman dari negara tetangga yang sedang berperang dan munculnya teror.

Keputusan Turki di bawah pemerintahan AKP memutuskan untuk membeli sistem pertahanan rudal jarak jauh yang disertai dengan transfer knowledge. Transfer knowledge yang diharapkan oleh Turki bertujuan agar kedepan Turki mampu memproduksi sendiri sistem pertahanan rudal jarak jauh. Keputusan ini menarik minat beberapa perusahaan yang memproduksi sistem pertahanan rudal jarak jauh untuk ikut dalam tender pengadaan sistem pertahanan rudal jarak jauh. Perusahaan-perusahaan yang mengikuti tender ini berasal dari beberapa negara seperti Raytheon.co dari Amerika Serikat yang memproduksi Rudal Patriot, perusahaan French-Italian Eurosam SAMP/T dan perusahaan yang berasal dari Tiongkok yaitu China Precision Machinery Import and Export Corp (CPMIEC) (Muhaimin, 2013).

Sistem rudal yang diproduksi dan dipesan oleh Turki merupakan sistem Rudal *Fang dun* atau FD-2000 yang merupakan versi ekspor dari HQ-9 (Sakaoğlu, 2014). Dengan dipilihnya rudal dari CPMIEC maka sistem rudal tersebut mengalahkan penawaran sistem rudal jarak jauh Patriot

dari Amerika Serikat, S-400 dari Rusia dan Eurosam Samp-T dari Perancis-Italia.

3. KESIMPULAN

Kebijakan politik luar negeri Turki terhadap Tiongkok pada masa pemerintahan AKP memang sudah jelas mengalami perubahan dari pemerintahan yang sebelumnya. Turki mempererat hubungan luar negerinya dengan Tiongkok pada masa pemerintahan AKP. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang muncul dari analisa terhadap kebijakan luar negeri Turki terhadap Tiongkok baik sebelum dan sesudah pemerintahan AKP.

Kemenangan AKP di Turki pada tahun 2002 menjadi momentum terjadinya perubahan orientasi politik luar negeri Turki. AKP sebagai partai pemenang pemilu dengan jumlah suara yang besar mampu membentuk pemerintahan yang kuat. Dengan pemerintahan yang kuat Turki dibawah pemerintahan AKP, Turki mampu menggeser orientasi politik luar negeri Turki dari yang memiliki kecondongan ke Dunia Barat menuju ke Dunia Timur.

Perubahan tersebut berdampak kepada hubungan Turki dengan Tiongkok. Bila sebelum pemerintahan AKP Turki tidak memiliki hubungan yang erat dengan Tiongkok, namun kini di bawah AKP perubahan kebijakan luar negeri Turki terhadap Tiongkok menjadi semakin erat. Padahal bila mengingat dalam catatan sejarah Tiongkok dengan Turki memiliki hubungan yang cukup rumit.

Perubahan kebijakan politik luar negeri Turki terhadap Tiongkok pada masa pemerintahan AKP dipengaruhi oleh faktor yang muncul dari adanya redefinisi identitas nasional Turki di bawah pemerintahan AKP. Identitas Turki dengan ideologi Kemalisme mengalami pergeseran. Kemalisme sebagai identitas nasional tetap dipertahankan di Turki, namun muncul kecenderungan pergeseran menuju pemikiran mengenai Neo-ottoman. Pemikiran Neo-ottomanisme

ingin dibangkitkan oleh Ahmet Davotoglu. Dalam pemikiran Neo-Ottomanisme ini Davotoglu ingin membangkitkan kejayaan masa lalu Turki dengan menjalin hubungan dengan negara yang memiliki kedekatan secara sejarah, nilai, dan budaya yang dimiliki. Tapi tidak hanya itu saja melalui pemikiran Davotoglu, Turki mendefinisikan dirinya kembali dan kepentingan nasionalnya yang diwujudkan melalui kebijakan luar negeri Turki.

Redefinisi identitas dan kepentingan nasional Turki diatas juga dipengaruhi oleh aspek kognitif dari para pemimpin Turki di bawah pemerintahan AKP. Para pemimpin Turki seperti Recep Tayyip Erdogan, Abdullah Gul dan Ahmet Davotoglu memiliki pengaruh yang besar terhadap pengambilan kebijakan luar negeri Turki. Dalam setiap pengambilan kebijakan luar negeri tentunya dipengaruhi oleh aspek kognitif pengambil kebijakan. Dengan demikian, kebijakan yang diambil seperti redefinisi identitas dan kepentingan nasional yang berdampak kepada output berupa kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh latar belakang dan karakter pengambil kebijakan.

Faktor lain yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Turki terhadap Tiongkok dipengaruhi oleh perasaan insecurity yang dirasakan oleh Turki. Faktor yang terakhir adalah pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Meskipun dalam politik internasional Tiongkok dan Turki masih berada dalam aliansi yang berbeda, interpretasi Turki atas pertumbuhan ekonomi Tiongkok membuat hubungan yang terjalin semakin dekat. Turki menginterpretasikan bahwa pertumbuhan ekonomi Tiongkok dapat menjadi salah satu sarana yang dapat memenuhi kepentingan nasional Turki.

Perubahan kebijakan luar negeri Turki terhadap Tiongkok pada masa pemerintahan AKP pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kepentingan nasional Turki. Perubahan yang terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor, namun faktor utama dari

adanya perubahan ini adalah redefinisi identitas Turki "*who they are and what they want*" (Wendt,1999) , siapa dirinya dan apa yang diinginkan mencerminkan identitas dan kepentingan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

AKParti.org. (n.d.). Election. Diakses pada 20 Oktober 2014, melalui Ak parti: m.akparti.org.tr/english/seclimer

Amb. Eric S. Edelman, P., Svante E. Cornell, P., Aaron Lobel, P., & Michael Makovsky, P. (2013). The roots of Turkish conduct: Understanding the evolution of Turkish policy in the Middle East. SETA .

Anggoro, W. D. (1 Oktober 2014). AS kecam kerjasama militer Turki-Cina. Okezone News. Diakses pada 15 Oktober 2014, melalui <http://news.okezone.com/read/2013/10/01/414/874596/as-kecam-kerja-sama-militer-turki-china>

Colakoglu, S. (2013). Turkey-China relations : Rising partnership. OrtadoguAnaliz Nisan, 32-45.http://www.chp.org.tr/en/?page_id=67

Hashem, N. (2010). Islam, Sekularisme, dan Demokrasi Liberal. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Karacasulu,N.& Uzgoren,E. (2007). Explaining social constructivist contributions to security studies. Perceptions:summer-auntum,27-48.

Karakas, C. (2007). Turkey: Islam and laicism between the interest of state, politics and society. Peace Researcher Institute Frankfurt (PRIF).

Ministry of Foreign Affairs. (n.d). Relation between Turkey and China. Diakses pada 12 September 2014, melalui <http://www.mfa.gov.tr>: <http://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-and-china.en.mfa>

Muhaimin. (27 September 2013). Turki pilih rudal China ketimbang dari AS & Rusia.

Sakaoğlu, E. T. (Maret 2014). Is Turkey 'gravitating' toward China?. Diakses pada 20 Oktober 2014, melalui <http://www.turkishweekly.net/op-ed/3171/is-turkey-39-gravitating-39-toward-china.html>

Shaw, S. J., & Shaw, E. K. (1977). History of the Ottoman Empire and the modern Turkey volume II : Reform, revolution, and republic: the rise of modern Turkey,1808-1975. Cambridge University Press.

Shichor, Y. (2009). Ethno-Diplomacy : The Uyghur hitch in Sino Turkish Relations. Policy Studies 53 .

Wendt, A. (1992).Anarchy is what states make of It :The social construction of power politics. International Organization, vol.46 No.2, 391-425.

Wendt,A. (1999). Social Theory of International Politics. Cambridge: Cambridge University Press